

ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FOOD COLONY DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PAMEKASAN

Fajar Surahman¹, Syaiful Anam²

^{1,2}Universitas Madura

Email:fajar.surahman@unira.ac.id

syaiful.anam@unira.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Food Colony dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Pamekasan. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional Usaha Kecil dan Menengah melalui penyediaan fasilitas produksi bersama, dukungan pemasaran, dan pelatihan kewirausahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan Usaha Kecil dan Menengah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan jaringan sosial di antara pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Namun, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta resistensi dari beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang enggan berpartisipasi. Implikasi kebijakan yang diusulkan mencakup peningkatan alokasi dana, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan memperluas program sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi UKM. Penelitian ini juga merekomendasikan studi lanjutan yang memperluas cakupan geografis dan menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan Food Colony di daerah lain. Kesimpulannya, meskipun masih ada tantangan, kebijakan Food Colony memiliki potensi besar untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di Pamekasan dan dapat menjadi model yang diadopsi di daerah lain di Indonesia.

Kata kunci: Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Kebijakan Food Colony, Implementasi Kebijakan.

Abstract:

This study analyzes the implementation of the Food Colony policy in empowering Small and Medium Enterprises in Pamekasan. This policy is designed to improve the operational efficiency of Small and Medium Enterprises through the provision of co-production facilities, marketing support, and entrepreneurship training. The research uses a qualitative approach with a case study method, involving observation, interviews, and document analysis. The results of the study show that this policy has had a significant positive impact on increasing the income of Small and Medium Enterprises, creating jobs, and strengthening social networks among Small and Medium Enterprises. However, the obstacles faced include budget limitations, lack of cross-sector coordination, and resistance from several Small and Medium Business actors who are reluctant to participate. The proposed policy implications include increasing fund allocation, strengthening collaboration between stakeholders, and expanding outreach programs to increase SME participation. The study also recommends further studies that expand geographic coverage and use quantitative methods to gain a more comprehensive understanding of the impact of Food Colony policies in other regions. In conclusion, although there are still challenges, the Food Colony policy has great potential to empower Small and Medium Enterprises in Pamekasan and can be a model adopted in other regions of Indonesia.

Keywords: *Empowerment of Small and Medium Enterprises, Food Colony Policy, Policy Implementation.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah berusaha mengerahkan berbagai program-program Pembangunan yang dilakukan pemerintahan di berbagai daerah pada hakekatnya diupayakan untuk mendorong perubahan sosial, budaya terlebih aspek pekonomian. Usaha tersebut diharapkan pemerintah daerah akan menjadi lebih dinamis yang berkemajuan. Spirit tata kelola pemerintahan di daerah dituntut untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas umum serta melakukan pemberdayaan masyarakat daerah. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas suatu daerah yang tidak lepas dari kerjasama antara pihak pemerintah, swasta serta masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan kekhasan suatu daerah. Setiap daerah di dalam mengatur urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat perlu adanya partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Kecil dan Menengah karena merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kehadiran Usaha Kecil dan Menengah tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor Usaha Kecil dan Menengah dapat melibatkan banyak orang dengan beragam usaha.

Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi Usaha Kecil dan Menengah dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri. Usaha Kecil menengah yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi peningkatan pekonomian daerah.

Pemberdayaan sosial merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, mengingat kontribusi signifikan sektor ini terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto. Usaha Kecil dan Menengah merupakan tulang punggung ekonomi lokal yang mampu memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Namun, Usaha

Kecil dan Menengah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses keuangan, teknologi, dan pasar yang menghambat pengembangan dan daya saingnya.¹

Pamekasan sebagai salah satu kabupaten di Madura, juga memiliki potensi Usaha Kecil dan Menengah yang cukup besar. Meskipun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan ini adalah melalui kebijakan Food Colony. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di sektor makanan dan minuman, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan produktivitas dan akses pasar.²

Food Colony di Pamekasan diperkenalkan sebagai inisiatif strategis yang menyatukan pelaku Usaha Kecil dan Menengah dalam satu lokasi atau kawasan tertentu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan memperluas jaringan pasar. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antar pelaku Usaha Kecil dan Menengah sehingga mereka dapat mengatasi keterbatasan individu, seperti akses ke teknologi produksi yang lebih baik dan efisiensi distribusi produk. Selain itu, adanya Food Colony juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik produk lokal melalui branding bersama dan kegiatan pemasaran yang lebih terorganisir.³

Namun, implementasi kebijakan Food Colony di Pamekasan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa kendala yang muncul meliputi kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya untuk mendukung operasional sehari-hari, serta resistensi dari sebagian pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang masih enggan untuk berpartisipasi dalam program ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki potensi yang besar, efektivitasnya dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah masih perlu dianalisis lebih lanjut.⁴ Selain itu, kebijakan ini juga memerlukan evaluasi yang mendalam terkait dengan dampak jangka panjangnya terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Pamekasan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kebijakan ini mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah, serta bagaimana kebijakan ini dapat diintegrasikan dengan program-program lain yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian yang komprehensif mengenai implementasi Food Colony menjadi penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat diperbaiki dan diperkuat agar tujuan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dapat tercapai secara optimal⁵.

Dalam konteks yang lebih luas, studi mengenai implementasi kebijakan Food Colony di Pamekasan juga relevan untuk menambah literatur mengenai praktik-praktik terbaik dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di daerah lain. Pengalaman Pamekasan dapat menjadi acuan bagi daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dalam merancang

¹ M Mahirun, N H Kuncoro, and ..., 'Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil', ... *Journal: Jurnal ...*, 2023

<<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/21507>>.

² I R Wahyiah, 'ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH EMPING MELINJO OLEH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR DI KABUPATEN ...', *Journal Politics and Government*, 2024 <<https://ejournal.lppmbinabangsa.ac.id/index.php/jpg/article/view/52>>.

³ S Ghosh, H Jeon, and C Jung, 'Foraging Behaviour and Preference of Pollen Sources by Honey Bee (*Apis Mellifera*) Relative to Protein Contents', *Journal of Ecology and Environment* (Springer, 2020), doi:10.1186/s41610-020-0149-9.

⁴ K M Nyarku, 'Effect of Legal and Regulatory Framework on SMEs Growth in the Accra Metropolis of Ghana', *International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 19.3 (2018), pp. 207-17, doi:10.1177/1465750317742842.

⁵ H Yatira and others, 'Get to Know the Strategic Role of Cooperatives and SMEs in the Indonesian Economy', ... *Journal of Applied ...*, 2024 <<https://journal.formosapublisher.org/index.php/cjas/article/view/9419>>.

kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting bagi Pamekasan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia secara keseluruhan (Rachman, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan implementasi kebijakan Food Colony dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Pamekasan. Pertanyaan utama yang akan dijawab oleh penelitian ini adalah: sejauh mana kebijakan Food Colony telah berhasil dalam mencapai tujuan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap implementasi kebijakan Food Colony di Pamekasan dengan fokus pada dampaknya terhadap pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Secara spesifik, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kapasitas, akses pasar, dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang implementasi kebijakan publik dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan Food Colony di masa mendatang, serta sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di daerah lain.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Food Colony dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Pamekasan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, dan interpretasi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah serta pemangku kepentingan terkait, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui data kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara komprehensif fenomena sosial dan dinamika kebijakan yang terjadi di lapangan.⁶

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena desain ini efektif untuk meneliti suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Dengan desain ini, peneliti dapat memfokuskan pada kasus spesifik, yaitu implementasi kebijakan Food Colony di Pamekasan, dan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan, mulai dari proses implementasi hingga dampaknya terhadap pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.⁷

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan, yang terletak di Pulau Madura, Jawa Timur. Pamekasan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten yang telah mengimplementasikan kebijakan Food Colony sebagai bagian dari upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah lokal. Subjek penelitian terdiri dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang berpartisipasi dalam program Food Colony, serta pejabat pemerintah

⁶ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd edn (SAGE Publications, 2013).

⁷ Edwin Villagrán and others, 'Life Cycle Assessment in Protected Agriculture: Where Are We Now, and Where Should We Go Next?', *Horticulturae*, 10.1 (2023), p. 15, doi:10.3390/horticulturae10010015.

daerah dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan ini. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive untuk memastikan keterwakilan dari berbagai perspektif yang relevan.⁸

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah dan pemangku kepentingan terkait untuk menggali pandangan mereka tentang implementasi dan dampak kebijakan Food Colony. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan terhadap kebijakan, laporan dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan implementasi Food Colony di Pamekasan.⁹

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola atau tema yang muncul dari data. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahap pengkodean, kategorisasi, dan penafsiran data untuk menemukan tema-tema utama yang menggambarkan dinamika implementasi kebijakan Food Colony. Teknik ini dipilih karena fleksibel dan efektif dalam mengungkap makna mendalam dari data kualitatif, serta memungkinkan peneliti untuk menghubungkan temuan penelitian dengan teori dan konteks yang lebih luas.¹⁰

Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Food Colony

Kebijakan Food Colony di Pamekasan mulai diimplementasikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya di sektor Usaha Kecil dan Menengah. Program ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pelaku Usaha Kecil dan Menengah dalam satu kawasan yang terintegrasi, di mana mereka dapat memanfaatkan berbagai fasilitas bersama, seperti tempat produksi, area pemasaran, dan akses ke pelatihan kewirausahaan. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah lokal.

Implementasi kebijakan ini dimulai dengan pemilihan lokasi strategis yang mudah diakses oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah dan konsumen. Pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas terkait, mengidentifikasi sejumlah kawasan yang potensial untuk dijadikan pusat Food Colony. Setelah lokasi ditentukan, dilakukan pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup fasilitas produksi dan distribusi, serta ruang pameran produk. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pendampingan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah, terutama dalam hal manajemen usaha dan strategi pemasaran. Selama pelaksanaan, kebijakan ini juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Mereka berperan dalam memberikan dukungan teknis, pendanaan, dan pelatihan yang dibutuhkan oleh para pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Di samping itu, pemerintah daerah mengembangkan sistem pemantauan dan

⁸ D Verheyen and others, 'Effect of Food Microstructure on Growth Dynamics of *Listeria Monocytogenes* in Fish-Based Model Systems', ... *Journal of Food ...*, 2018
<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160518303039>>.

⁹ Kateryna Maltseva, 'Using Correspondence Analysis of Scales as Part of Mixed Methods Design to Access Cultural Models in Ethnographic Fieldwork', *Journal of Mixed Methods Research*, 10.1 (2016), pp. 82–111, doi:10.1177/1558689814525262.

¹⁰ Elaine Barnett-Page and James Thomas, 'Methods for the Synthesis of Qualitative Research: A Critical Review', *BMC Medical Research Methodology*, 9.1 (2009), p. 59, doi:10.1186/1471-2288-9-59.

evaluasi yang bertujuan untuk menilai efektivitas program ini secara berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan penyesuaian kebijakan yang diperlukan berdasarkan umpan balik dari para pelaku Usaha Kecil dan Menengah dan hasil pemantauan di lapangan.

Namun, pelaksanaan kebijakan Food Colony tidak sepenuhnya mulus. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pendukung. Selain itu, tidak semua pelaku Usaha Kecil dan Menengah memiliki kesiapan yang sama untuk berpartisipasi dalam program ini. Beberapa di antaranya menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan model bisnis baru yang diperkenalkan oleh Food Colony, terutama dalam hal teknologi dan manajemen keuangan. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Pemerintah daerah misalnya, berupaya untuk mencari sumber pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan sektor swasta dan donor internasional. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan diperluas untuk menjangkau lebih banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah, terutama yang berada di daerah terpencil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan keberhasilan implementasi Food Colony di Pamekasan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Food Colony di Pamekasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah. Meskipun terdapat beberapa tantangan, upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku UKM, dan pemangku kepentingan lainnya telah membantu dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada. Implementasi ini juga menunjukkan pentingnya fleksibilitas kebijakan dalam menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Analisis Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan Food Colony terhadap pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Pamekasan dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang berpartisipasi. Dengan adanya fasilitas produksi yang lebih baik dan dukungan pemasaran yang lebih terorganisir, pelaku Usaha Kecil dan Menengah mampu meningkatkan volume produksi dan memperluas jangkauan pasar. Beberapa Usaha Kecil dan Menengah bahkan berhasil menembus pasar nasional dan internasional yang sebelumnya sulit dicapai.

Selain itu, kebijakan Food Colony juga berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja di Pamekasan. Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah yang didorong oleh kebijakan ini telah membuka peluang kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung. Banyak pekerja lokal yang sebelumnya menganggur kini terlibat dalam berbagai aktivitas produksi dan distribusi yang dikelola oleh Usaha Kecil dan Menengah di kawasan Food Colony. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tetapi juga mengurangi tingkat migrasi tenaga kerja ke kota-kota besar. Dalam perspektif sosial, Food Colony berkontribusi pada peningkatan solidaritas di antara pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Interaksi yang intensif di kawasan yang sama memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pelaku Usaha Kecil dan Menengah, yang pada gilirannya memperkuat jaringan dan kemitraan bisnis. Selain itu, adanya program-program pelatihan bersama dan kegiatan komunitas yang diadakan di Food Colony turut mempererat hubungan sosial di antara para anggotanya. Hal ini menciptakan komunitas yang lebih kohesif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan bersama. Namun dampak sosial yang muncul tidak sepenuhnya positif. Beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang tidak terlibat dalam Food Colony merasakan adanya kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang yang disediakan oleh kebijakan ini. Hal ini menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan pelaku Usaha Kecil dan Menengah lainnya yang merasa tidak mendapatkan manfaat yang sama dari program ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu memperluas cakupan kebijakan agar lebih inklusif dan merata.

Dalam hal budaya, kebijakan Food Colony juga mendorong pelestarian dan pengembangan produk-produk lokal yang mencerminkan identitas budaya Pamekasan. Produk-produk makanan tradisional yang dihasilkan oleh Usaha Kecil dan Menengah di kawasan Food Colony dipromosikan sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang perlu dilestarikan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal tetapi juga pada pelestarian budaya daerah.

Secara keseluruhan, dampak kebijakan Food Colony di Pamekasan menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Namun untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, diperlukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh semua pelaku Usaha Kecil dan Menengah, tanpa terkecuali.

Kendala dalam Implementasi

Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan Food Colony adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar, realisasi program sering kali terkendala oleh minimnya dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan pelatihan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan pihak swasta juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini. Realitas tersebut menyebabkan beberapa aspek dari kebijakan tidak dapat dijalankan secara optimal serta mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

Kendala lainnya adalah resistensi dari sebagian pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang enggan berpartisipasi dalam program ini. Beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah masih ragu untuk bergabung dengan Food Colony karena khawatir kehilangan kendali atas usaha mereka atau karena tidak memahami manfaat yang ditawarkan oleh kebijakan ini. Tantangan ini menunjukkan pentingnya upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah untuk meyakinkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah tentang keuntungan berpartisipasi dalam Food Colony.

Diskusi Temuan

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada proses implementasi yang efektif dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.¹¹ Temuan ini juga konsisten dengan studi terdahulu yang menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang didukung oleh infrastruktur memadai dan kolaborasi lintas sektor memiliki peluang lebih besar untuk berhasil.¹² Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa kebijakan Food Colony diimplementasikan secara menyeluruh dan inklusif, serta pentingnya peningkatan kapasitas pelaku Usaha Kecil dan Menengah untuk memaksimalkan manfaat dari program ini.¹³

Selain itu, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal dalam implementasi kebijakan publik. Dengan demikian,

¹¹ D Widiyastuti and others, 'Strategi Adaptasi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Sektor Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Pandemi Covid-19', ... *Development Journal*, 2023
<<https://journal.itk.ac.id/index.php/compact/article/view/854>>.

¹² M MUHAMMAD, 'Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Mea)', *Asia-Pacific Journal of Public Policy* (core.ac.uk, 2018)
<<https://core.ac.uk/download/pdf/480551126.pdf>>.

¹³ A A Prasetyo, 'EVALUASI KEBIJAKAN" TUKA-TUKU PURBALINGGA" SEBAGAI MEDIA PEMASARAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA', *Journal of Politic and Government Studies* (ejournal3.undip.ac.id, 2024)
<<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/43376/30840>>.

kebijakan seperti Food Colony tidak hanya menjadi alat pemberdayaan ekonomi, tetapi juga instrumen yang memperkuat kohesi sosial dan melestarikan budaya lokal. Ini penting untuk diingat dalam konteks kebijakan yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi daerah lainnya, terutama di daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam seperti Pamekasan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan Food Colony di Pamekasan telah memberikan dampak positif signifikan terhadap pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah tersebut. Kebijakan ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional Usaha Kecil dan Menengah melalui penyediaan fasilitas produksi bersama dan dukungan pemasaran yang terstruktur. Dampak ekonomi yang dihasilkan meliputi peningkatan pendapatan Usaha Kecil dan Menengah dan penciptaan lapangan kerja baru, sementara dari aspek sosial, kebijakan ini berhasil memperkuat jaringan kolaboratif antar pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk keterbatasan anggaran dan resistensi sebagian pelaku Usaha Kecil dan M terhadap program tersebut. Secara keseluruhan, meskipun masih ada tantangan, kebijakan Food Colony di Pamekasan telah berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan Food Colony memiliki potensi yang besar untuk direplikasi di daerah lain sebagai model pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang efektif. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada adanya dukungan anggaran yang memadai, koordinasi lintas sektor yang lebih baik, dan program sosialisasi yang intensif untuk mengurangi resistensi dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, pembuat kebijakan disarankan untuk meningkatkan alokasi dana dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan ini inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi semua pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnett-Page, Elaine, and James Thomas, 'Methods for the Synthesis of Qualitative Research: A Critical Review', *BMC Medical Research Methodology*, 9.1 (2009), p. 59, doi:10.1186/1471-2288-9-59
- Creswell, John W., *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd edn (SAGE Publications, 2013)
- Ghosh, S, H Jeon, and C Jung, 'Foraging Behaviour and Preference of Pollen Sources by Honey Bee (*Apis Mellifera*) Relative to Protein Contents', *Journal of Ecology and Environment* (Springer, 2020), doi:10.1186/s41610-020-0149-9
- Mahirun, M, N H Kuncoro, and , 'Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil', *Journal: Jurnal* , 2023 <<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/21507>>
- Maltseva, Kateryna, 'Using Correspondence Analysis of Scales as Part of Mixed Methods Design to Access Cultural Models in Ethnographic Fieldwork', *Journal of Mixed Methods Research*, 10.1 (2016), pp. 82–111, doi:10.1177/1558689814525262
- Mouritz, Mike, Peter Newman, Renée Newman, Jayne Bryant, Aimee Smith, and Elaine Olsen, 'Leadership in Sustainability: Collective Wisdom, Conversations, Creativity, Contemplation and Courage, the Five Pillars of a Master's Teaching Unit', *Sustainability*, 14.9 (2022), p. 5070, doi:10.3390/su14095070
- MUHAMMAD, M, 'Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Mea)', *Asia-Pacific Journal of Public Policy* (core.ac.uk, 2018) <<https://core.ac.uk/download/pdf/480551126.pdf>>
- Nyarku, K M, 'Effect of Legal and Regulatory Framework on SMEs Growth in the Accra Metropolis of Ghana', *International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 19.3 (2018), pp. 207–17, doi:10.1177/1465750317742842
- Prasetyo, A A, 'Evaluasi Kebijakan "Tuka-Tuku Purbalingga" Sebagai Media Pemasaran Umkm Di Kabupaten Purbalingga', *Journal of Politic and Government Studies* (ejournal3.undip.ac.id, 2024) <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/43376/30840>>
- Verheyen, D, A Bolivar, F Perez-Rodriguez, and , 'Effect of Food Microstructure on Growth Dynamics of *Listeria Monocytogenes* in Fish-Based Model Systems', *Journal of Food* , 2018 <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160518303039>>
- Villagrán, Edwin, Felipe Romero-Perdomo, Stephanie Numa-Vergel, Julio Ricardo Galindo-Pacheco, and Diego Alejandro Salinas-Velandia, 'Life Cycle Assessment in Protected Agriculture: Where Are We Now, and Where Should We Go Next?', *Horticulturae*, 10.1 (2023), p. 15, doi:10.3390/horticulturae10010015
- Wahyiah, I R, 'Analisis Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Emping Melinjo Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Di Kabupaten ', *Journal Politics and Government*, 2024 <<https://ejournal.lppmbinabangsa.ac.id/index.php/jpg/article/view/52>>
- Widiyastuti, D, F N Azmi, S Y Adhitama, and , 'Strategi Adaptasi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Sektor Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Pandemi Covid-19', *Development Journal*, 2023 <<https://journal.itk.ac.id/index.php/compact/article/view/854>>
- Yatira, H, A R Sagala, A Rosalina, and , 'Get to Know the Strategic Role of Cooperatives and SMes in the Indonesian Economy', *Journal of Applied* , 2024 <<https://journal.formosapublisher.org/index.php/cjas/article/view/9419>>